



## **Implementasi Strategi Komunikasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat melalui Program Kampung Iklim di Kabupaten Magelang**

### ***Implementation of Communication Strategy for Community Based on Climate Change Adaptation and Mitigation in Kampung Iklim Program at Magelang Regency***

**Fadilatul Karima<sup>1</sup>** ✉

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Diterima 31 Agt 2022 Direvisi 24 Okt 2022 Diterbitkan 31 Okt 2022	<i>Drought and landslide disasters in Magelang Regency have moved people in Margoyoso Village and Sambak Village to carry out adaptation and mitigation activities as responses to the vulnerability experienced. The Government of Magelang Regency, strengthening climate grassroots movements through the Kampung Iklim Program by encouraging the involvement of stakeholders at the cross-level to support ProKlim activities. The research was conducted on October 13th, 2021, until January 4th, 2022. This research used a qualitative method, to reveal and understand the implementation of ProKlim communication strategy based on the information, views, and experiences of key informants. The results show that the implementation of the ProKlim communication strategy in Magelang Regency is carried out through actions of effective communication that synergize elements of advocacy, social mobilization, and participation. Strengthening the local people community, has encouraged community participation and behavior change at the individual level.</i>
e-ISSN 2747-2264 p-ISSN 2746-4628	
<i>Keywords:</i> Communication development, Communication strategy, Climate change, Adaptation, Mitigation	

Penulis Koresponden :

E-mail : [fadilatulkarima@mail.ugm.ac.id](mailto:fadilatulkarima@mail.ugm.ac.id)

**ABSTRAK**

*Bencana kekeringan dan tanah longsor di Kabupaten Magelang telah menggerakkan masyarakat di Desa Margoyoso dan Desa Sambak untuk melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi sebagai respon dari kerentanan yang dialami. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) mengupayakan penguatan kegiatan adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat dengan mendorong keterlibatan berbagai pihak di lintas level untuk mendukung kegiatan ProKlim. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 13 Oktober 2021 hingga 4 Januari 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk mengungkapkan dan memahami implementasi strategi komunikasi ProKlim berdasarkan pada informasi, pandangan dan pengalaman dari informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi komunikasi ProKlim di Kabupaten Magelang dilakukan melalui pola dan tindakan komunikasi efektif yang mensinergikan elemen advokasi, mobilisasi sosial, dan partisipasi. Melalui strategi penguatan kelembagaan di tingkat tapak, telah mendorong partisipasi masyarakat dan mengupayakan perubahan perilaku hingga tingkat individu.*

*Kata kunci:  
Komunikasi  
Pembangunan,  
Strategi Komunikasi,  
Perubahan Iklim,  
Adaptasi dan Mitigasi*

**PENDAHULUAN**

Risiko bencana di Indonesia, 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Dampak perubahan iklim di tahun 2020 hingga 2035, diprediksi memicu perubahan suhu dan peningkatan intensitas curah hujan ekstrim di Indonesia, sehingga mengakibatkan peningkatan risiko kejadian bencana seperti banjir dan kekeringan, yang kemudian memberi dampak pada penurunan produksi pertanian, hingga peningkatan penyakit demam berdarah, dan *heatstress* di perkotaan (Bappenas, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang rendah emisi dan berketahanan iklim, melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat di tingkat tapak (KLHK, 2017). Komitmen untuk meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat menjadi penting, karena kemampuan adaptasi masyarakat di negara berkembang cenderung rendah (Evans et al., 2018).

Kabupaten Magelang termasuk wilayah yang rentan mengalami bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, seperti bencana tanah longsor, kekeringan, angin kencang, dan angin puting beliung. Kejadian bencana kekeringan di Kabupaten Magelang yang meluas di tahun 2019, merupakan dampak dari puncak kemarau yang terjadi hingga akhir Oktober 2019, sedangkan peningkatan bencana tanah longsor di tahun 2020 disebabkan adanya peningkatan akumulasi curah hujan akibat dari fenomena La-Nina yang terjadi sejak Oktober 2020 hingga April 2021 (BPBD Kab. Magelang, 2020). Kecamatan Kajoran dan Kecamatan Salaman, merupakan dua

kecamatan yang memiliki intensitas tertinggi terhadap bencana tanah longsor dan kekeringan, namun terdapat sekelompok masyarakat yang aktif melakukan kegiatan adaptasi, sebagai respon terhadap bencana yang terjadi di wilayahnya.

Kegiatan adaptasi yang dilakukan salah satunya adalah penanaman bambu lintas desa yang diinisiasi oleh masyarakat di Desa Margoyoso. Kegiatan ini merupakan respon terhadap bencana kekeringan yang dialami masyarakat Desa Margoyoso, sedangkan masyarakat di Desa Sambak melakukan budidaya agroforestri kopi sebagai bentuk mitigasi sekaligus upaya untuk menjadikan bukit-bukit di Desa Sambak sebagai wilayah tangkapan air. Pengalaman masyarakat dalam merespon kerentanan bencana yang dialami, telah mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengembangkan ProKlim sebagai gerakan massif yang melibatkan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan kapasitas adaptif masyarakat di tingkat tapak.

ProKlim menjadi program yang mendukung kapasitas kelembagaan masyarakat untuk mengupayakan peningkatan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Pengembangan kegiatan ProKlim di Kabupaten Magelang, telah mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), seiring dengan penghargaan *trophy* ProKlim Utama yang diberikan oleh KLHK di 8 lokasi berbeda sejak tahun 2014 hingga 2020, serta terpilihnya Kabupaten Magelang sebagai rujukan ProKlim Nasional dan Kecamatan Borobudur sebagai lokasi Jambore ProKlim Nasional di tahun 2019. Pengembangan kegiatan ProKlim di Kabupaten Magelang, mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki strategi komunikasi yang dapat mewujudkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi komunikasi ProKlim yang menjadi program andalan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat di Kabupaten Magelang. Urgensi tersebut didukung dengan hasil penelitian Evans et al. (2018) mengenai rendahnya kapasitas adaptif masyarakat di negara berkembang terhadap perubahan iklim, serta jumlah penggiat ProKlim di Indonesia yang baru mencapai 14% dari target yang ditentukan oleh KLHK, yaitu 20.000 kampung iklim di tahun 2024. Selaras dengan hal tersebut, diperlukan adanya strategi untuk mensinergikan berbagai elemen di lintas sektor (pemerintah, industri, komunitas, dan masyarakat) dan lintas level (Lu dan Xu, 2017), untuk memastikan peningkatan kapasitas adaptif masyarakat mampu mendukung pembangunan rendah karbon. Oleh sebab itu, penelitian mengenai implementasi strategi komunikasi diperlukan, karena penelitian mengenai adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat, tidak cukup hanya berfokus pada kemampuan kognitif, afektif dan/atau *behavioral* (perilaku) masyarakat saja.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Magelang dengan desa partisipan yaitu Desa Sambak, Kecamatan Kajoran dan Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman. Penelitian dimulai tanggal 13 Oktober 2021–4 Januari 2022. Pemilihan Desa Sambak dan Desa Margoyoso untuk memperdalam analisis implementasi strategi komunikasi, sehingga dipilih kedua desa yang aktif dalam mengembangkan kegiatan ProKlim dan merupakan

dua desa yang berada di kecamatan dengan intensitas tertinggi terhadap bencana tanah longsor dan kekeringan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini berorientasi pada tindakan, sehingga metode pendekatan kualitatif digunakan sebagai upaya untuk mengungkapkan dan memahami implementasi strategi komunikasi ProKlim berdasarkan pada informasi, pandangan dan pengalaman dari informan penelitian (Tabel 1). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi dan studi pustaka. Wawancara mendalam dilakukan dengan individu yang mewakili instansi yang memiliki keterlibatan dalam implementasi ProKlim di Kabupaten Magelang. Informan kunci yang dipilih adalah informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi berkaitan dengan strategi komunikasi ProKlim di Kabupaten Magelang.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Metode
1	Bappeda Kabupaten Magelang	a. Perencana Pertama Bappeda (Anggota Tim Pembina ProKlim Kabupaten)	a. Wawancara mendalam b. Kepustakaan c. Dokumentasi
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang	a. Sekretaris DLH (Wakil Ketua Pembina Tim Pembina ProKlim Kabupaten) b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan (Penanggung Jawab Teknis Tim Pembina ProKlim Kabupaten) c. Fungsional DLH (Anggota Tim Pembina ProKlim Kabupaten)	a. Wawancara mendalam b. Observasi partisipatif c. Kepustakaan d. Dokumentasi
3	BPBD Kabupaten Magelang	a. Staff Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK) Magelang	a. Kepustakaan b. Dokumentasi
4	Pemerintah Desa	a. Kepala Desa Sambak b. Kepala Desa Margoyoso	a. Wawancara mendalam b. Observasi partisipatif c. Kepustakaan d. Dokumentasi
5	Kelompok kerja (Pokja) ProKlim Desa	a. Ketua Pokja ProKlim Desa Sambak b. Ketua Pokja ProKlim Desa Margoyoso	a. Wawancara mendalam b. Observasi partisipatif c. Kepustakaan d. Dokumentasi

Pada penelitian ini, validitas data dilakukan melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menintrepetasi data berdasarkan pada fakta di lapang, serta menghubungkan hasil analisis dengan literature yang digunakan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi pembangunan dan perubahan sosial yang dikembangkan oleh Servaes (2020) untuk menganalisis implementasi strategi komunikasi ProKlim dalam meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat di tingkat tapak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kabupaten Magelang dimulai sejak tahun 2014, sebagai program untuk menilai aksi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim yang sudah dilakukan oleh masyarakat di wilayah rentan terhadap bencana kekeringan dan longsor. ProKlim di Kabupaten Magelang memiliki tujuan (a) meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, dan (b) meningkatkan serta menguatkan kapasitas adaptif masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di tingkat tapak. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut melalui (a) dukungan kebijakan di tingkat Kabupaten hingga Desa, (b) membangun networking atau jejaring kerjasama, dan (c) pembinaan. Pengembangan kegiatan yang sudah ada di masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan (a) kerentanan yang dialami masyarakat, (b) kegiatan yang telah dilakukan masyarakat, (c) potensi yang dimiliki, dan (d) kebijakan lokal yang mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sejak tahun 2014 hingga 2017, ProKlim di Kabupaten Magelang hanya menangkap desa-desa yang telah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kemudian di daftarkan melalui sistem registri nasional (SRN) untuk penilaian kategori ProKlim oleh KLHK. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pilot project ProKlim di Kabupaten Magelang, melihat kegiatan adaptasi dan mitigasi yang sudah ada di masyarakat melibatkan berbagai elemen dan memiliki manfaat untuk keberlanjutan hidup masyarakat, sehingga melakukan perubahan strategi untuk memperluas manfaat ProKlim ke desa lainnya. Hal ini terlihat ketika Desa Sambak di tahun 2017 masuk sebagai desa binaan ProKlim melalui kegiatan mitigasi pengolahan limbah tahu menjadi biogas dan budidaya agroforestri kopi. Oleh sebab itu, sejak tahun 2017 ProKlim di Kabupaten Magelang menjadi sebuah gerakan massif untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim di tingkat tapak.

Perkembangan ProKlim sebagai gerakan massif pada tahun 2017, menjadi titik awal penguatan komunikasi efektif sebagai strategi komunikasi ProKlim di Kabupaten Magelang. Komunikasi efektif dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari identifikasi, penilaian, perencanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan ProKlim diawali dengan penilaian terhadap pengetahuan dan daya dukung *stakeholder* lokal, yaitu (a) kapasitas untuk menyebarkan kegiatan, menggunakan teknologi dan membangun jejaring kerjasama, (b) kapasitas kelembagaan dan kebijakan terkait lingkungan di tingkat tapak, (c) ketersediaan tenaga ahli lokal, dan (e) dukungan eksternal. Proses penilaian awal ini dilakukan dengan melibatkan Tim Pembina ProKlim DLH, Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa, LSM, dan pihak lain yang berkaitan dengan wilayah sasaran untuk menilai pengetahuan dan daya dukung lokal terhadap kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Keterlibatan berbagai pihak dalam ProKlim, bertujuan untuk mendorong partisipasi *stakeholder* di tingkat desa hingga kabupaten, untuk berkolaborasi meningkatkan dan menguatkan kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan iklim. Hal ini dalam strategi komunikasi pembangunan, identik dengan sinergitas antara advokasi, mobilisasi sosial dan komunikasi perubahan perilaku, yang mampu

mewujudkan keberlanjutan dari suatu program pembangunan (Subejo, 2016). Hasil penelitian menemukan bahwa dalam implementasi strategi komunikasi ProKlim di Kabupaten Magelang, pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten hingga Desa, memberi dukungan advokasi. DLH melakukan upaya penguatan ProKlim melalui pendekatan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung kegiatan ProKlim melalui kebijakan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh DLH dengan OPD di tingkat Kabupaten hingga Desa, menghasilkan dukungan kebijakan berupa regulasi dan optimalisasi pendanaan kegiatan ProKlim.

Tabel 2. Regulasi ProKlim Kabupaten Magelang

No	Regulasi	Isi Regulasi	Sasaran	Cakupan wilayah
1.	SK. Pembentukan Tim Pembina ProKlim Kabupaten tahun 2018	Penetapan Tim Pembina Program Kampung Iklim tahun 2018 Tugas dan tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Pembina ProKlim	OPD Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan kegiatan ProKlim LSM dan Akademisi/Perguruan Tinggi	Kabupaten Magelang
2.	Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2019	Pembentukan Program Kampung Iklim di setiap Kecamatan	Kepala Camat	Kabupaten Magelang
3.	Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2019	Pembentukan Program Kampung Iklim di setiap Desa/kelurahan	Kepala Desa/Kelurahan	Kabupaten Magelang
4.	ProKlim masuk dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024	ProKlim sebagai implementasi dari program peningkatan kapasitas dan tata lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Magelang
5.	SK. Pembentukan Satuan Tugas ProKlim Desa Margoyoso Tahun 2020	Penetapan Satuan Tugas Program Kampung Iklim (ProKlim) Desa Margoyoso Tugas dan tanggung jawab setiap kedudukan Struktur Organisasi Satuan Tugas ProKlim Desa Margoyoso	Satuan Tugas ProKlim Kelembagaan Desa	Desa Margoyoso

6	SK. Pembentukan Kelompok Kerja ProKlim Desa Sambak Tahun 2020	Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Program Kampung Iklim (ProKlim) Desa Sambak Tugas dan tanggung jawab setiap kedudukan Struktur Organisasi Kelompok Kerja ProKlim Desa Sambak.	Pokja ProKlim Kelembagaan Desa	Desa Sambak
6	SK. Pembentukan Komunitas Jogo Tuk.	Penetapan Komunitas Jogo Tuk Tugas dan tanggung jawab setiap kedudukan	Kelembagaan Desa	Dusun dan Desa
7	Penetapan Tim Penyusun Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembina Program Kampung Iklim Inklusif tahun 2021	Penetapan Tim Penyusun Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembina Program Kampung Iklim Inklusif tahun 2021 Tugas dan tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Pembina ProKlim	OPD Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan kegiatan adaptasi dan mitigasi LSM dan Akademisi/Perguruan Tinggi LSM yang bergerak dibidang kelompok inklusif	Kabupaten Magelang

Sumber: Data primer dan data sekunder diolah (2022)

Produk regulasi tersebut menunjukkan pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh DLH mampu mendorong kebijakan di Kabupaten Magelang untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak. Sekretaris DLH menyatakan bahwa penerbitan regulasi instruksi bupati adalah cara yang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian Bupati terhadap isu dampak perubahan iklim di Kabupaten Magelang. Hal tersebut karena, Bupati memiliki power dan pengaruh yang tinggi, sehingga dengan terbitnya instruksi bupati mampu mendorong Kepala Camat dan Kepala Desa untuk melaksanakan ProKlim di wilayahnya masing-masing.

Servaes dan Lie (2020) menyatakan bahwa komunikasi advokasi dapat mendukung pembangunan dan perubahan sosial apabila kebijakan yang dihasilkan mampu menyalurkan opini dan mendukung kebutuhan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, penerbitan instruksi bupati tahun 2019, merupakan respon dari adanya laporan masyarakat mengenai matinya sumber mata air (tuk) di beberapa titik, sekaligus sebagai respon terhadap hasil kajian ilmiah LIPI mengenai bencana krisis air di Pulau Jawa yang diprediksi terjadi di tahun 2040. Kedua hal tersebut juga menjadikan ProKlim dan kegiatan konservasi mata air sebagai agenda prioritas dalam program peningkatan kapasitas dan tata lingkungan hidup dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024.

Instruksi Bupati terkait ProKlim menjadi media untuk mendorong Kepala Camat dan Kepala Desa, untuk meningkatkan kegiatan adaptasi dan mitigasi di wilayahnya

masing-masing. Hal tersebut dilanjutkan melalui dukungan kebijakan di tingkat tapak, melalui pembentukan Pokja ProKlim dan komunitas Jogo Tuk. Pembentukan Pokja ProKlim dan Komunitas Jogo Tuk adalah upaya strategi komunikasi yang dapat menggerakkan kelembagaan desa untuk terlibat dalam ProKlim.

Penelitian ini menemukan, bahwa Komunitas Jogo Tuk di Kabupaten Magelang diawali dari Desa Margoyoso yang menginisiasi gerakan penanaman bambu lintas wilayah, dengan melibatkan Kelembagaan antar desa, masyarakat antar desa, dan komunitas pengrajin bambu (koperbam) Desa Margoyoso, untuk melakukan kegiatan penanaman bambu di sekitar mata air, sebagai respon terhadap bencana kekeringan yang terjadi di Desa Margoyoso. Ketua Pokja ProKlim menyatakan bahwa kegiatan penanaman bambu antar desa merupakan bentuk dari gotong royong yang saling menguntungkan, karena masyarakat di desa lainnya memperoleh manfaat ekonomi dari penjualan bambu ke Koperbam, dan Koperbam memberikan kembali bibit bambu untuk ditanam, sedang masyarakat Desa Margoyoso memperoleh manfaat dari air yang mengalir ke desanya.

Kegiatan masyarakat di Desa Margoyoso menunjukkan feedback masyarakat terhadap kekeringan yang dialami, memberi manfaat lingkungan dan ekonomi kepada masyarakat. Hal tersebut merespon Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menguatkan kegiatan yang sudah ada, dengan menggerakkan kelembagaan desa untuk membentuk Komunitas Jogo Tuk. Penerbitan SK. Komunitas Jogo Tuk dan SK. Pokja ProKlim, merupakan upaya untuk menguatkan kelembagaan di tingkat tapak, yang dilakukan dengan membentuk wadah kelembagaan masyarakat desa untuk saling berkoordinasi dalam mengidentifikasi, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dukungan kebijakan tersebut dalam sistem sosial-ekologi dapat dijelaskan sebagai bentuk dari penyesuaian sistem sosial terhadap dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Magelang. Menurut Ingwersen et al. (2013), dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini merupakan feedback yang diberikan lingkungan akibat dari kegiatan manusia, yang kemudian direspon oleh manusia dengan mekanisme penyesuaian kegiatan yang dapat mengurangi kerentanan yang dialami. Penelitian ini menemukan bahwa DLH memiliki pemahaman, melalui kebijakan instruksi bupati dan pembentukan komunitas Jogo Tuk, akan memberi dampak secara tidak langsung terhadap pencegahan krisis air di Kabupaten Magelang.



(a)



(b)

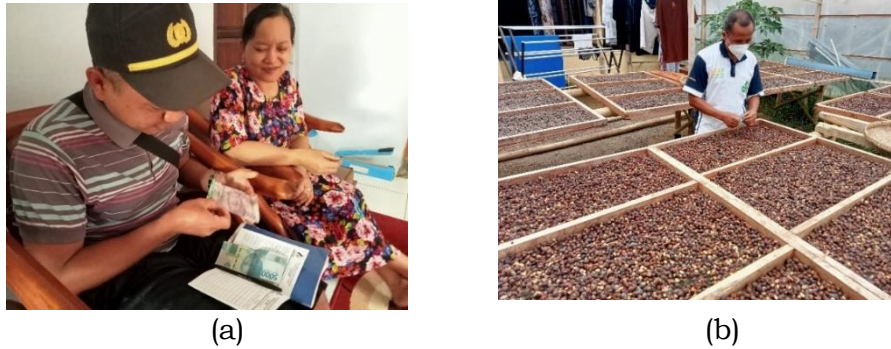


Gambar 1. Kegiatan adaptasi dan mitigasi bernilai ekonomi di Desa Margoyoso: (a) Pengrajin bambu Desa Margoyoso membuat kerajinan dari bambu konservasi Komunitas Jogo Tuk; (b) Budidaya tanaman rambat kemukus untuk pencegahan penebangan pohon (Dokumentasi Peneliti, 2021).

Penerapan mobilisasi sosial ditunjukkan dengan adanya pelibatan dan pengerahan dukungan dari lembaga, jaringan komunitas, kelompok sosial, kelompok agama, dengan tujuan untuk mendukung penyampaian kebutuhan dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan (Subejo, 2016, p. 9). Pokja ProKlim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi antara *stakeholder* lokal dengan *stakeholder* external, menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi, menilai dan menyusun perencanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, akademisi dan pihak lainnya dalam mendukung kegiatan ProKlim, merupakan praktik dan pola komunikasi efektif yang menjadi strategi komunikasi ProKlim di Kabupaten Magelang. Menurut Sekretaris DLH, komunikasi efektif yang dilakukan dalam ProKlim memberi peluang seluruh pihak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ProKlim.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk melibatkan berbagai pihak adalah melalui penerapan *multitrack communication* yang disesuaikan dengan sasaran komunikasi. Pendekatan komunikasi monologis dilakukan dengan menjadikan instruksi bupati sebagai media yang menginformasikan dan mendorong keterlibatan OPD dalam kegiatan ProKlim sesuai dengan kapasitas masing-masing. Komunikasi dialogis dalam ProKlim digunakan untuk melibatkan partisipasi seluruh pihak dalam penilaian, perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ProKlim, sehingga perkembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi disetiap wilayah berasal dari masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di masyarakat, didasarkan pada kegiatan yang sudah dimiliki oleh setiap komunitas desa yang tergabung dalam Pokja ProKlim, sehingga memberi peluang untuk mendorong peningkatan kapasitas adaptif di tingkat komunitas hingga individu. Kegiatan seperti pengelolaan biogas dari limbah tahu yang dilakukan oleh Komunitas Biogas Lestari di Desa Sambak, berperan mendorong masyarakat -khususnya ibu-ibu- untuk beralih menggunakan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti gas rumah tangga. Hal tersebut menurut Kepala Desa Sambak memberi pengaruh terhadap penghematan pengeluaran biaya rumah tangga di 44 rumah tangga, karena iuran pemeliharaan biogas lebih murah dibandingkan membeli gas untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan lainnya, seperti kegiatan budidaya kemukus yang dilakukan oleh Gapoktan di Desa Margoyoso telah menggerakkan petani untuk melakukan budidaya kemukus dengan memanfaatkan pohon sebagai media rambatan. Hal ini sekaligus sebagai cara untuk pencegahan terhadap penebangan pohon yang dilakukan atas dasar kebutuhan ekonomi. Kepala Desa Margoyoso menyatakan bahwa melalui budidaya kemukus, mendorong perilaku masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon dan tetap memperoleh pendapatan melalui penjualan kemukus basah dan kering.



Gambar 2. Kegiatan adaptasi dan mitigasi bernilai ekonomi di Desa Sambak: (a) Kegiatan iuran pemeliharaan biogas oleh kelompok masyarakat biogas lestari; (b) Kegiatan pengolahan kopi agroforestri bukit potorono (Dokumentasi Peneliti, 2021).

Hasil penelitian Faedlulloh (2017) tentang partisipasi masyarakat pada ProKlim di Jakarta, menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan ProKlim adalah untuk melatih dan merawat proses partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berdaya dan mandiri mengembangkan kegiatan adaptasi dan mitigasi di wilayahnya. Hal tersebut memberi refleksi, bahwa pembentukan Pokja ProKim menjadi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mencapai kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kapasitas adaptif yang dimiliki terhadap dampak perubahan iklim. Pokja ProKlim tidak hanya menjadi wadah koordinasi antar *stakeholder*, namun juga menjadi wadah kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam menilai dan mendiagnosa kerentanan dan potensi yang dimiliki, serta memonitoring dan mengevaluasi kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan. Penelitian ini menemukan bahwa Pokja ProKlim memegang peran utama dalam menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan iklim. Hal ini menunjukkan, bahwa implementasi strategi komunikasi ProKlim di Kabupaten Magelang, mencakup upaya mendorong perubahan perilaku di tingkat komunitas hingga individu.

Pokja ProKlim sebagai aktor penggerak masyarakat, keberadaannya harus disertai dukungan dari Pemerintah melalui pendampingan, pembinaan, dan dukungan jejaring kerjasama, sehingga mampu menguatkan kapasitas Pokja ProKlim sebagai aktor penggerak kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengupayakan jejaring kerjasama antar instansi, LSM dan akademisi yang dimiliki oleh Tim Pembina ProKlim dan Pokja ProKlim, mampu memberi daya dukung berupa pengadaan infrastruktur dan fasilitasi diantaranya pembinaan dan informasi karakteristik wilayah, seperti data titik mata air dan pengukuran cadangan karbon. Dukungan yang diberikan melalui jejaring kerjasama tersebut, dinilai oleh Sekretaris DLH dan Kepala Desa, membantu pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi di masing-masing desa.

Berdasarkan hasil penelitian Dewi et al. (2019) tentang potensi keberlanjutan ProKlim di Surakarta, menghasilkan kajian bahwa aspek ekologi, sosial dan ekonomi menjadi tolak ukur dari keberlanjutan ProKlim. Aspek ekonomi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis

masyarakat, yang tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan nilai pendapatan masyarakat, namun juga melalui ketahanan ekonomi yang diperoleh dari diversifikasi pendapatan (Dewi et al., 2019; Roy, 2018). Selaras dengan hal tersebut, implementasi strategi komunikasi ProKlim Pemerintah Kabupaten Magelang, perlu memberi perhatian pada penguatan dan peningkatan kapasitas kerjasama Pokja ProKlim dengan *business sector*, karena hal ini berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu penentu keberlanjutan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat (Dewi et al., 2019). Implementasi strategi komunikasi yang mampu melibatkan *business sector* dalam program adaptasi berbasis masyarakat, dapat mendukung keberlanjutan aspek ekonomi masyarakat dari kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan. Menurut Roy (2018), *business sector* dalam program adaptasi berbasis masyarakat mampu memberi dukungan keberlanjutan melalui pendanaan kegiatan, pengembangan produk dan penguatan ekonomi masyarakat.

## KESIMPULAN

Pola dan tindakan komunikasi efektif yang dipahami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai strategi komunikasi, mampu melibatkan elemen Pemerintah, organisasi/LSM, akademisi dan kelembagaan/komunitas masyarakat, untuk mendukung peningkatan kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan iklim di tingkat tapak. Keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam mengidentifikasi dan menganalisis secara menyeluruh situasi dan kondisi sasaran program, menunjukkan implementasi strategi yang dilakukan merupakan upaya untuk mensinergikan elemen advokasi, mobilisasi sosial dan mendorong partisipasi seluruh pihak untuk mendukung kegiatan ProKlim. Keterlibatan Pemerintah dan Kelembagaan masyarakat lintas level, berperan dalam menentukan produk regulasi yang dihasilkan mampu menguatkan peran pelaksana ProKlim dan kegiatan adaptasi yang mendukung kebutuhan masyarakat. Penguatan peran pelaksana ProKlim di tingkat tapak melalui pembentukan Pokja ProKlim di tingkat Desa, mendorong perubahan perilaku di tingkat komunitas hingga individu. Implementasi strategi komunikasi ProKlim di Kabupaten Magelang, perlu memperkuat dan memperluas jejaring kerjasama yang dimiliki Pokja ProKlim di tingkat desa, terutama jejaring *business sector* yang mampu memberi dukungan keberlanjutan ekonomi dari kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (hal.189-213)*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dewi, A. E., Maryono, M., dan Warsito, B. 2019. Potential Sustainability of "Kampung Iklim" Program in Surakarta Municipal. *ECS Web of Conferences, The 4th International Conference on Energy, Environment, Epidemiology and Information System (ICENIS 2019)*, Vol.125: 1-5. doi:<https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912502002>
- Evans, H.-C., Dyll, L., dan Teer-Tomaselli. 2018. Communicating Climate Change: Theories and Perspectives. Dalam W. L. Filho, E. Manolas, A. M. Azul, U. M.

- Azeiteiro, dan H. McGhie (Penyunt.), *Handbook of Climate Change Communication: Vol.1 Theory of Climate Change Communication* (hal. 107-122). Switzerland: Springer International Publishing.
- Faedlulloh, D., Irawan, B., dan Prasetyanti, R. 2017. Program Unggulan Kampung Iklim (ProKlim) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4 (1): 28-44.
- Ingwersen, W. W., Garmestani, A. S., Gonzalez, M. A., dan Templeton, J. J. 2013. A System Perspective on Response to Climate Change. *U.S. Environmental Protection Agency Papers*. doi:DOI 10.1007/s10098-012-0577-z
- KLHK. 2017. *Road Map: Program Kampung Iklim (Proklm) Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lu, Y., dan Xu, J. 2017. Cybernetic paradigm based innovative approaches towards coping with climate change. *Journal Systems Engineering Society of China and Springer*, 26 (3): 359-382.
- Roychani, Muflichah. 2021. Infografis Kejadian Bencana Kabupaten Magelang 2020 (1 Januari 2020 – 31 Desember 2020). Retrieved from BPBD Kabupaten Magelang. <<https://bpbd.magelangkab.go.id/home/detail/infografis-kejadian-bencana-kabupaten-magelang-2020---1-januari-2020-%E2%80%9331-desember-2020-/562>> (diakses 2 Agustus 2022).
- Roy, R. 2018. Evaluating the Sustainability of Community Based-Adaptation: A Case Study of Bangladesh. Dalam W. L. Filho, E. Manolas, A. M. Azul, U. M. Azeiteiro, dan H. McGhie (Penyunt.), *Handbook of Climate Change Communication: Vol.1 Theory of Climate Change Communication* (hal. 39-59). Switzerland: Springer International Publishing.
- Servaes, J. 2020. Terms and Definitions in Communication for Development and Social Change. Dalam J. Servaes, *Handbook of Communication for Development and Social Change* (hal. 3 - 14). Singapore: Springer.
- Servaes, J., dan Lie, R. 2020. Key Concepts, Disciplines, and Fields in Communication for Development and Social Change. Dalam J. Servaes, *Handbook of Communication for Development and Social Change* (hal. 29-59). Singapore: Springer.
- Subejo. 2016. Menuju Pergeseran Paradigma Komunikasi Pembangunan Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional Lustrum II Prodi S2/S3 PKP Sekolah Pascasarjana UGM*, 1-13.